

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.
Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

KEWARGANEGARAAN DAN PRANATA HUKUM DI INDONESIA



Kewarganegaraan dan Pranata Hukum di Indonesia

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.
Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

INDONESIA

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

KBM
INDONESIA



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku

KEWARGANEGARAAN DAN PRANATA HUKUM DI INDONESIA

Copyright @2026 by *Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H, M.Kn., dkk.*

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) 081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.

Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Rizqi Sufia

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc

15,5 x 23 cm, vi + 176 halaman

Cetakan ke-1, Januari 2026

ISBN: 978-634-278-073-2

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>|www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia|@penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026014299, 23 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Dr. Rath Mega Puspasari, S.H., M.Kn. dan Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.**
Alamat : Perum Mutiara Gading Residence Blok A15 Rt/Rw 010/009, Kel Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50272
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Rath Mega Puspasari, S.H., M.Kn. dan Dr. Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H.**
Alamat : Perum Mutiara Gading Residence Blok A15 Rt/Rw 010/009, Kel Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50272
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **KEWARGANEGARAAN DAN PRANATA HUKUM DI INDONESIA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Januari 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001092754

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
dan
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari kegelisahan yang cukup klasik namun terus terasa relevan: mengapa pembicaraan tentang kewarganegaraan dan pranata hukum sering kali terdengar seperti ritual akademik yang penuh istilah, tetapi justru jauh dari denyut hidup masyarakat sehari-hari? Padahal, dua bidang ini adalah jantung yang menjaga arah perjalanan sebuah negara—menentukan bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana warga diperlakukan, dan bagaimana keadilan diupayakan, meski tak selalu tercapai sepenuhnya. Penyusunan buku ini memerlukan upaya merangkum berbagai pemikiran, regulasi, dan perkembangan terbaru di Indonesia. Di dalamnya, saya berusaha menempatkan hukum bukan sekadar sebagai teks, melainkan sebagai praktek sosial yang hidup—yang dipengaruhi sejarah, budaya, serta kompleksitas interaksi antara warga dan institusi negara. Harapannya, pembaca dapat melihat bahwa kewarganegaraan bukan hanya status, tetapi peran aktif; dan pranata hukum bukan hanya bangunan formal, tetapi mekanisme bersama yang harus terus diperbaiki. Terima kasih saya sampaikan kepada para kolega, mahasiswa, dan pembaca yang selalu memberikan ruang dialog yang membuka perspektif baru. Tanpa interaksi seperti itu, buku ini tidak akan menemukan bentuknya. Semoga buku ini memberi manfaat, mendorong diskusi yang lebih kritis, serta menginspirasi pembaruan dalam praktik hukum dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Akhirnya, jika buku ini dapat membuat pembaca merasa sedikit lebih akrab dengan negara yang mereka huni—itu sudah lebih dari cukup. Dunia hukum dan kewarganegaraan memang rumit, tetapi keduanya juga ruang tempat kita bersama-sama belajar menjadi masyarakat yang lebih adil.

Penulis



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAB 1 MENJADI WARGA NEGARA: IDENTITAS, HAK, DAN PERAN	1
1.1 Pengertian Warga Negara dalam Perspektif Sejarah.....	1
1.2 Dasar Hukum Kewarganegaraan di Indonesia	5
1.3 Identitas Kebangsaan: Dari Tradisi hingga Era Digital.....	9
1.4 Peran Warga Negara dalam Negara Demokratis.....	12
1.5 Tantangan Kewarganegaraan di Era Globalisasi.....	16

BAB 2 FONDASI NEGARA: PANCASILA, KONSTITUSI, DAN SISTEM KETATANEGARAAN.....	21
2.1 Pancasila sebagai Ideologi dan Norma Fundamental.....	25
2.2 UUD 1945: Struktur, Prinsip, dan Amandemen.....	28
2.3 Pembagian Kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif... ..	31
2.4 Lembaga-Lembaga Negara dan Kewenangannya	34
2.5 Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Dinamika Politik Modern.....	38

BAB 3 TEORI DAN FILOSOFI HUKUM.....	43
3.1 Hakikat Hukum: Moral, Norma, dan Keadilan	43
3.2 Aliran-Aliran Pemikiran Hukum (Positivisme, Natural Law, Realisme)	46
3.3 Sumber-Sumber Hukum Indonesia.....	49

3.4	Fungsi Hukum dalam Masyarakat Plural.....	53
3.5	Hubungan Etika Publik dan Penegakan Hukum.....	56

BAB 4 PRANATA HUKUM DI INDONESIA 61

4.1	Konsep Pranata Hukum: Pengertian dan Ruang Lingkup.....	62
4.2	Pranata Hukum Formal: Negara dan Aparat Resmi.....	65
4.3	Pranata Hukum Nonformal: Adat, Komunitas, dan Praktik Sosial	68
4.4	Perbandingan Pranata Hukum Indonesia dan Negara Lain.....	72
4.5	Tantangan Modernisasi Pranata Hukum di Indonesia	75

BAB 5 POLITIK HUKUM DAN LEGISLASI 79

5.1	Politik Hukum Indonesia: Orientasi dan Paradigma	79
5.2	Proses Pembentukan Undang-Undang	82
5.3	Peran DPR, Presiden, dan Partisipasi Publik	85
5.4	Analisis Tumpang Tindih Regulasi dan Solusi Harmonisasi	88
5.6	Evaluasi Regulasi: Dari Naskah Akademik hingga Judicial Review	91

BAB 6 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 97

6.1	Sistem Peradilan: Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat	97
6.2	Mekanisme Penegakan Hukum Pidana.....	101
6.3	Proses Peradilan Perdata dan Sengketa Administratif .	104
6.4	Problematisa Penegakan Hukum: Korupsi, Mafia Peradilan, dan Politik	107
6.5	Inovasi Penegakan Hukum: E-Court, Restorative Justice, dan Mediasi	110

BAB 7 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 115

- 7.1 Hukum Adat: Kearifan yang Terstruktur..... 116
- 7.2 Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia..... 119
- 7.3 Kewajiban Konstitusional dan Etika Kewargaan 122
- 7.4 Perlindungan Hak Sipil dan Politik..... 125
- 7.5 Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya..... 128
- 7.6 Konflik Hak dan Penyelesaiannya dalam Sistem Hukum... 131

BAB 8 DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK 135

- 8.1 Konsep Demokrasi dan Perkembangan Model Demokrasi Indonesia 136
- 8.2 Pemilu sebagai Instrumen Kedaulatan Rakyat..... 139
- 8.3 Peran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Sipil ... 141
- 8.4 Pendidikan Kewargaan dan Literasi Politik..... 144
- 8.5 Tantangan Demokrasi Digital: Disinformasi, Polarisasi, dan Big Data 145

BAB 9 TANTANGAN HUKUM KONTEMPORER 149

- 9.1 Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa..... 150
- 9.2 Kejahatan Siber dan Hukum Teknologi 151
- 9.3 Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Digital..... 153
- 9.4 Ketimpangan Akses Keadilan dan Masalah Kemiskinan Hukum..... 154
- 9.5 Krisis Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum .. 156

BAB 10	MASA DEPAN KEWARGANEGARAAN DAN	
PRANATA HUKUM		159
10.1	Arah Reformasi Agraria dan Implikasi Hukum	160
10.2	Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Jangka Panjang.....	162
10.3	Transformasi Digital dalam Sistem Hukum	163
10.4	Kewarganegaraan Digital dan Generasi Baru	165
10.5	Penguatan Integritas dan Etika Institusi Publik.....	166
10.6	Visi Pranata Hukum Indonesia yang Adaptif, Humanis, dan Berintegritas.....	168
DAFTAR PUSTAKA		171
PROFIL PENULIS		173



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cotta, S., & Dhamoon, R. (2020). *Citizenship, Identity, and Democracy*. New York: Routledge.
- Dahlan Thaib. (2011). *Teori Konstitusi dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Denny Indrayana. (2008). *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Jakarta: Kompas.
- Heywood, A. (2018). *Political Ideologies: An Introduction*. London: Palgrave.
- Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2012). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2005). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: FH UI Press.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Demokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nurcholish Madjid. (2003). *Indonesia Kita*. Jakarta: Paramadina.
- Soekarno. (1964). *Pancasila: Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Soemantri, S. (2001). *Bahan Ajar Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Strong, C. F. (1996). *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.

Suyatno. (2015). *Kewarganegaraan dan Demokrasi*. Yogyakarta: Ombak.

Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan: *Demokrasi, HAM, dan Civil Society*. Jakarta: Kencana.

Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: *Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

PROFIL PENULIS



PROFIL PENULIS 1



Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang Berikut beberapa karya penting yang telah penulis terbitkan:

1. Puspa Sari, R. M., & Gunarto, G. (2018). Peranan PPAT dalam pensertifikatan tanah akibat jual beli. *Jurnal Akta*, 5(1), 324-960.
2. Yono, S., Sulistiyono, A., Mashdurohatun, A., & Sari, R. M. P. (2020). Reconstruction of Separate-Creditor Positions in the Process Declaring Bankruptcy in Indonesia Based on Justice Value. *SCH. INT'L JL CRIM. JUS.*, 11, 334.
3. Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. The form of resolution of juvenile delinquency in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 40(1), 118-128.
4. Puspasari, R. M. (2019). Reconstruction of Criminal Sanctions On Actors Of Online Prostitution Based On Justice Value. *Law Development Journal*, 1(1), 32-38.
5. Laksana, A. W., Lubis, M. R., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 416-439.

6. Deriana, N., & Puspasari, R. M. (2025). Restorative Resolution of Child Cases in the Implementation of the Child Criminal Justice System. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(4), 361-376.
7. Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
8. Puspasari, R. M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection in the Execution of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
9. Sari, R. M. P. (2025). Analysis of the Implementation of the Criminal Procedure Code in Handling Cyber Crimes: Between Effectiveness and Justice. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(6), 85-92.
10. Sari, R. M. P. (2025). Criminal Responsibility in Cybercrime: An Analysis of Phishing Crimes in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(5), 49-55.
11. Sari, R. M. P., PP, A. I., Lumingkewas, C. S., & Mariani, M. (2025). The Role of Notaries in Civil Agreements Legality and Validity of Deeds. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(3), 13-27.
12. SARI, I. N. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
13. Ichwan, A., & Puspasari, R. M. The Role of Legal Aid Institutions in Resolution Industrial Relations Disputes Against Workers Based on Justice. *Ratio Legis Journal*, 4(3), 2711-2729.
14. Sari, I. N., & Puspasari, R. M. Legal Protection for Parties in Online Sales and Purchase Agreements. *Ratio Legis Journal*, 4(2), 2318-2335.
15. Sari, R. M. P. The Marriage Agreement as an Effort to Prevent Domestic Violence (KDRT). *JURNAL AKTA*, 12(2), 636-643.

Penulis dapat dihubungi melalui

e-mail: ratihmega@unissula.ac.id

ID Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=TX1JxcMAAAJ&hl=id>

ID Shinta: 6736605

PROFIL PENULIS 2



Sivani Ardi Apritania, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang Berikut beberapa karya penting yang telah penulis terbitkan:

1. Sari, R. M. P., & Apritania, S. A. The form of resolution of juvenile delinquency in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 40(1), 118-128.
2. Apritania, S. A. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
3. Apritania, S. A., & Gunarto, G. Legal Politics Regional Head Election Dispute Settlement in The Constitutional Court. *Ratio Legis Journal*, 2(2), 999-1010.

Penulis dapat dihubungi melalui

e-mail: sivaniardi@unissula.ac.id

ID Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&user=BuoOY48AAAAJ

ID Shinta: